

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Eksekutif Review* Dalam Proses Penyusunan Raperda Terhadap Penarikan Draft Raperda Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya Tentang Pondok Pesantren ini adalah:

1. Dasar dari penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya ini ditarik dengan alasan peraturan Perundang-undangan tidak boleh tumpang tindih dan peraturan tentang Pondok Pesantren tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren serta Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, hal ini didasarkan juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa “Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati atau wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”
2. Mekanisme Tahapan dan Penarikan terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Pondok Pesantren telah sesuai dengan Peraturan Daerah

Kota Palangka Raya Nomor 21 tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, dan Peraturan DPRD kota Palangka Raya nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dimasukan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian *Eksekutif Review* Dalam Proses Penyusunan Raperda Terhadap Penarikan Draft Raperda Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya Tentang Pondok Pesantren ini adalah:

1. Bagi penyelenggara *Eksekutif Review* untuk tetap menjalankan kewenangannya seperti pengawasan, analisis, dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang tumpang tindih lainnya, mengingat efektivitas penerapan *Eksekutif Review* dalam studi kasus Raperda Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya tentang Penarikan draft penarikan Rancangan peraturan daerah tentang Pondok Pesantren sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Bagi pembentuk produk hukum daerah untuk tetap memperhatikan urgensi dilihat dari studi kasus Raperda Inisiatif DPRD Kota Palangka

Raya tentang Penarikan draft Raperda tentang Pondok pesantren yang dimana peraturan tersebut sudah diatur sebelumnya dalam peraturan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren serta Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren sehingga seharusnya tidak perlu adanya produk hukum baru di tingkat daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aryojati Ardipandato**, 2020, *“Peranan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah”*, Seri ke-1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo**, 2021, *“Prinsip Legislatif Dan Akademik Drafting”*, Seri ke-1, PT Kanisius, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dadang Suwanda**, 2016, *“Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD”*, seri ke-1, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dadang Suwanda**, 2020, *“Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan perda Yang responsif”*, seri ke-1, Rosda Karya, Bandung
- Djojosoekarto, Agung**, 2006, *“Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD”*, Seri ke-2, Plaza Amita, Jakarta.
- I Ketut Putra Erawan**, 2006, *“Akunstabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD”*, Seri ke-2, Plaza Amita, Jakarta.
- Mintarti Indartini**, 2019, *“Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah”*, Percetakan IVORIE, Solo.
- Muhaimin**, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*, Seri ke-1, Mataram University Press, NTB.
- Nugroho, Riant**, 2006, *“Membangun Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD”*, Seri ke-2, Plaza Amita, Jakarta.
- Ramon Kaban**, 2016, *“Peranan Kontrol Sosial Anggota DPRD Terhadap Pemerintah Provinsi”*, Seri ke-1, Yrama Widya, Bandung.

Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 21 Tahun 2019 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.**
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 Tentang pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.**
- Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang pendidikan Pesantren.**
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren.**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jurnal.

- Arifuddin N**, 2020, *“Implementasi fungsi Legislasi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah”*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 23 No 1, STISIP Petta Baringeng.
- Made Dhana Pranata**, 2021, *Problematik Hukum tentang executive Review Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, hlm 1334
- Muhammad Siddiq Armia**, 2016, *“Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus”*, Jurnal RechtsVinding, Volume 5 Nomor 2, Universitas UIN Ar-Raniry.
- Taqwa Gaffar**, 2022, *“Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo”*, Jurnal Ada Na Gau: Public Administration, Volume 3, Universitas Puangrimaggalatung.
- Taufik H Simatupang**, 2019, *“Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”*, Jurnal Hukum De Jure, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Yudi Ayubchan**, 2013, *“Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dan Efektifitas Pelaksanaannya Pada Pemerintah Kota Kediri”*, Jurnal Ilmu Hukum-Vol 1. (Fakultas, Univ)

Internet dan Lain-lain.

- “Badan pembentukan Peraturan Daerah”, 2022, Url: <https://dprd.bandungbaratkab.go.id/akd/badan-pembentukan-peraturan-daerah/>.
- “DPRD Palangka Raya Tarik Raperda pondok Pesantren”, 2022, BorneoNews, Url: <https://www.borneonews.co.id/berita/276579-dprd-palangka-raya-tarik-raperda-pondok-pesantren-ini-alasannya>.
- “Mekanisme Pencabutan Peraturan Daerah”, 2010, HukumOnline, Url: <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-pencabutan-peraturan-daerah-lt575ff81fd70ea>
- Nafiatul Munawaroh, 2022, “5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah”, Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-lt62da5d870df68>, 23 Februari 2023
- “Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/kota”, 2018, Jdih. Kalteng <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota>

- “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan”, 2012, Url: <https://jdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/958455pembentukan-peraturan-daerah.pdf>
- “Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”, 2018, Satpol PP.Bojonegoro.go.id, Url: <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14#:~:text=Pengertian%20Peraturan%20Daerah%20dan%20Peraturan,dengan%20persetujuan%20bersama%20Kepala%20Daerah>
- “Pengertian Produk Hukum Daerah”, 2015, hukumsetda.go.id, Url: <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>
- “Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi dan Problematikanya)”. Sumut, kemenkumham, 2015, URL: <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya>
- “Pengertian DPRD”, 2019, DPRD Banjarnegara https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109#:~:text=Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20Daerah%20merupakan,Daerah%20melalui%20pelaksanaan%20hak%2C%20kewajiban
- Repository.uin, 2018, “tinjauan umum tentang Eksekutif Review”, repository.uin, https://repository.uinsuska.ac.id/15980/8/8.%20BAB%200III_2018264IH.pdf
- “Tujuan Dari Usulan Perda Inisiatif Pondok Pesantren Gagasan Fraksi PKB DPRD Mura”, 2021 <https://kaltengtoday.com/ini-tujuan-dari-usulan-perda-inisiatif-pondok-pesantren-gagasan-fraksi-pkb-dprd-mura/>.